

The Reform Initiatives

Merupakan lembaga riset kebijakan yang bernaung di bawah PT Semesta Infomedia Indonesia, berkedudukan di Jakarta.

TRI fokus pada penelitian kebijakan terkait Ekonomi, Fiskal, Kesejahteraan Sosial, Desentralisasi, Lingkungan Hidup & Perubahan Iklim, Tata Kelola Kebijakan yang Baik, Politik & Elektoral, Penegakan Hukum, Ekonomi Digital, serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).



Zainul Abidin

Research Associate -
The Reform Initiatives (TRI)

Peringatan Dini Tanpa Aksi Dini

Pertengahan Agustus lalu, tim satuan tugas karhutla di Ogan Ilir menghadapi persoalan yang mungkin terdengar mustahil, mereka kehabisan air untuk memadamkan api. Kanal-kanal di sekitar rawa yang terbakar sudah kering lebih dulu. Sejak Januari, 540 hektare lahan di kabupaten itu hangus dalam 162 kejadian. Kekeringan dan kebakaran datang sebagai satu paket, dan paket itu sudah diumumkan jauh hari.

Padahal kemarau tahun ini termasuk yang paling lama diumumkan. Pada 4 Maret 2026, BMKG sudah menyatakan musim kemarau datang lebih awal dari rata-rata dan membuka kemungkinan El Niño muncul pada semester kedua. Pemutakhiran Juni menaikkan peluang El Niño kategori lemah ke angka 100 persen, moderat 98 persen, dan kuat 62 persen. Organisasi Meteorologi Dunia menyatakan El Niño aktif pada 2 Juni. Akhir Juli, indeks El Niño-Southern Oscillation (ENSO) menyentuh +1,59, dan BMKG menyebut fenomena ini berpotensi naik ke level sangat kuat serta bertahan hingga awal 2027.

BMKG mencatat 17 kali operasi modifikasi cuaca sepanjang 2026 untuk mitigasi kebakaran hutan dan lahan, ditambah tiga operasi pengisian waduk di Sumatera Utara, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Tengah. Kementerian Pertanian menyiapkan pompanisasi dan penguatan irigasi. Mendagri meminta seluruh kepala daerah bersiaga sejak akhir Juni. Bahkan, Presiden melaksanakan rapat terbatas bersama menteri-menteri untuk membahas hal ini pada 28 Juli lalu.

Persoalannya terletak pada respons pemerintah bukan untuk mencegah sedini mungkin, tapi reaktif terhadap persoalan yang terjadi. Ketika rapat terbatas itu digelar, akumulasi titik panas nasional sudah melewati 80 ribu dan sekitar 103 ribu hektare lahan terbakar. Pantau Gambut mencatat 30 ribu titik panas sepanjang Januari sampai Juni, jauh di atas periode yang sama pada tahun-tahun El Niño sebelumnya: 7.181 titik pada 2023, 23.300 pada 2019, dan 16.164 pada 2015. Di sisi kekeringan, BNPB mencatat 13 provinsi dan 47 kabupaten/kota terdampak pada akhir Juli, enam provinsi di antaranya sudah menetapkan status siaga darurat. Koordinasi tingkat tinggi datang setelah angka-angka itu terbentuk.

Dampak dari kekeringan ekstrem ini, juga dapat dilihat dari satuan yang lebih konkret. Di Kabupaten Bogor, kekeringan menyentuh 28.281 keluarga atau sekitar 93.914 jiwa yang tersebar di 28 kecamatan. Kalimantan Barat mencatat area terbakar terluas secara nasional, sekitar 28.680 hektare hingga awal Agustus, disusul Riau lebih dari 15 ribu hektare. Pemerintah Kota Palangka Raya memperpanjang status tanggap darurat hingga 8 September. Pemantauan media Kompas menemukan 119 kabupaten/kota diberitakan mengalami kekeringan sepanjang sebulan terakhir Juli. Semua respons itu berjalan, dan semuanya berjalan setelah kejadian.

Belajar dari Filipina

Filipina sebagai negara tetangga terdekat dan kondisi alam yang mirip dengan Indonesia menghadapi ancaman serupa dengan cara berbeda. Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA) sebuah badan resmi cuaca dan iklim di Filipina di bawah Department of Science and Technology (DOST) menerbitkan El Niño Alert ketika peluang kemunculan masih 79 persen, dan angkanya kemudian naik ke 92 persen untuk kategori moderat hingga kuat pada kuartal keempat. Selain itu, Departemen Pertaniannya mengaktifkan kembali El Niño Task Force pada akhir April, berbulan-bulan sebelum dampaknya terasa di lapangan. Pemerintah menyandarkan responsnya pada El Niño Action Plan yang diperbarui, yang membagi mitigasi ke lima sektor: pangan, air, kesehatan, energi, dan keselamatan publik.

Isi pakatnya sebagian besar tidak eksotis. Ada penyediaan benih tahan kering, penyangga stok benih padi dan jagung, penyesuaian kalender tanam, pemeriksaan sistem irigasi besar, pemetaan risiko kekeringan, penempatan sarana produksi di daerah rawan sejak awal, penguatan asuransi pertanian, dan pelonggaran akses kredit bagi petani. Yang membuatnya berbeda adalah kapan semua itu dijalankan. Risikonya pun dihitung lebih dulu. Manila mengumumkan estimasi kehilangan produksi beras hingga 700 ribu ton, setara 3,5 persen target tahunan, serta potensi penurunan produksi pertanian 20 sampai 30 persen bila El Niño berkembang parah. Angka itu keluar pada Mei, ketika sawah belum kering. Dengan estimasi tersebut di tangan, Manila lebih dulu mengamankan

kesepakatan pasokan beras 1,5 juta ton dari Vietnam. Pengadaan ini disiapkan sebagai opsi, bukan sebagai reaksi panik saat harga sudah bergerak.

Perbandingan ini perlu diletakkan dengan jujur. Puncak El Niño di Filipina diperkirakan datang pada November, sementara puncak kemarau Indonesia jatuh pada Agustus dan September. Manila punya ruang ancang-ancang lebih panjang. Justru karena tenggatnya lebih pendek, Indonesia lebih membutuhkan mekanisme yang bekerja otomatis, bukan yang menunggu rapat.

Indonesia tidak perlu meniru struktur kelembagaan Filipina. Yang layak diambil adalah cara mengubah prakiraan menjadi keputusan. Prakiraan iklim BMKG hari ini berfungsi sebagai informasi, belum sebagai pemicu kebijakan. Tidak ada ambang batas yang, begitu dilewati, otomatis menggerakkan penyesuaian kalender tanam, distribusi benih berumur pendek, pembasahan gambut, penambahan armada tangki air, atau perluasan bantuan sosial di wilayah rawan.

Ditanya soal anggaran menghadapi El Niño pada awal Agustus, Menko Polkam Djamari Chaniago menyatakan pemerintah belum menetapkan tambahan dalam jumlah tertentu karena kondisi dinilai belum menuntut pengerahan berskala besar. Ia mengatakan "berapa pun Presiden akan mengeluarkan yang diperlukan". Kalimat itu menenangkan sebagai janji politik, tetapi memperlihatkan bahwa belanja antisipasi belum memiliki alokasi tersendiri. Anggaran BNPB sepanjang 2026 sendiri tercatat Rp491 miliar.

Struktur pencairannya juga terikat pada kejadian. Dana siap pakai baru bisa digunakan setelah kepala daerah menetapkan status darurat, dan penetapan itu kerap tertunda oleh pertimbangan administratif maupun politik lokal. Akibatnya regu pemadam di tingkat tapak sering kekurangan biaya operasional pada minggu-minggu awal, ketika api masih kecil dan paling murah dipadamkan.

Instrumen yang lebih antisipatif sebenarnya sudah tersedia. Pooling Fund Bencana yang dibentuk melalui Perpres 75/2021 telah menghimpun sekitar Rp7,3 triliun hingga November 2025 dan dirancang membiayai seluruh fase penanggulangan bencana, termasuk prabencana. Dana itu belum tersambung dengan prakiraan musim. UN ESCAP, dalam kajian yang secara khusus menyebut Indonesia bersama Malaysia, Filipina, dan Timor Leste, merekomendasikan pembiayaan dini lewat perlindungan sosial dan dukungan bagi petani sebagai cara menekan ongkos di kemudian hari.

Kerangka yang dibutuhkan tidak rumit untuk dirumuskan. Tetapkan ambang risiko berbasis indeks ENSO, jumlah hari tanpa hujan, dan tinggi muka air gambut. Sambungkan tiap ambang dengan paket tindakan yang sudah disepakati lintas kementerian sebelum musim dimulai. Kunci sumber dana yang bisa dicairkan tanpa menunggu penetapan status darurat. Tunjuk satu pihak yang bertanggung jawab menyalakan mekanisme itu, dan yang bisa ditanya ketika mekanisme tidak menyala.

El Niño diperkirakan bertahan sampai awal 2027, dan BMKG memprediksi Indian Ocean Dipole positif menguat pada September hingga Desember. Ujian yang sesungguhnya belum lewat. Indonesia jelas tidak kekurangan peringatan. Yang belum terlihat adalah alat untuk mengubah peringatan itu menjadi keputusan yang keluar sebelum kerugian selesai dihitung.